

**TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020**

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|------------------------------|--|--|--|--|---|-----------------------|
| KEPALA KANTOR WILAYAH | | | | | | |
| 1. | Seluruh Satuan Kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) | Terwujudnya Satuan Kerja yang memperoleh nilai RB Sangat Baik (>70-80) | Meningkatnya jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Nilai RB Sangat Baik (>70-80) | B03: 1. Pembentukan Tim RB Satuan Kerja 2. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) 3. Persiapan Pemenuhan data dukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2020 4. Persiapan Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020 | B03: 1. SK Tim RB dan Tim Pembangunan ZI 2. Laporan Persiapan | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | B06: 1. Tindak lanjut internalisasi pelaksanaan <i>Road Map</i> Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 serta Rencana Kerja Tahunan RB Tahun 2020 2. Internalisasi Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB 3. Internalisasi Aplikasi E-RB 4. Pemenuhan data dukung PMPRB tahun 2020 5. Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020 | B06: Laporan | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|---|-----------------|-----------------------|
| | | | | B09: 1. Pemenuhan data dukung PMPRB tahun 2020 2. Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020 | B09: Laporan | |
| | | | | B12: 1. Pemenuhan data dukung PMPRB tahun 2020 2. Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020 | B12: Laporan | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|--|--|---|--|--|-----------------------|
| 2. | Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi dan peningkatan nilai maturitas SPIP | 1. Terlaksananya SPIP dengan fokus kepada Peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan maturitas SPIP | Meningkatnya tingkat maturitas SPIP Kemenkumham terdefinisi dengan interval skor 3 menuju 4 | <p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan/ Pembaharuan Satgas SPIP di Kantor wilayah dan UPT Sosialisasi Target Tingkat Maturitas SPIP pada Kantor Wilayah dan UPT oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan | <p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> SK Tim Satgas SPIP Laporan hasil sosialisasi | |
| | | | | <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendampingan Penguatan Tingkat Maturitas SPIP pada Kantor Wilayah dan UPT oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan <i>Self assesment</i> penilaian maturitas SPIP Kanwil dan UPT | <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil pendampingan penguatan Hasil Penilaian <i>Self Assesment</i> Kanwil dan UPT | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|---|---|--|---|-----------------------|
| | | | | B09: Monev pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP pada Kanwil dan UPT | B09: Laporan monev pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP | |
| | | | | B12: Monev pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP pada Kanwil dan UPT | B12: Laporan monev pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP | |
| | | 2. Implementasi Manajemen Risiko (MR) | Terselenggaranya penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 | B03 : Persiapan pendampingan MR: 1. Berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan 2. <i>Workshop/Rapat</i> Dalam Kantor (RDK) | B03 : Notula/Laporan kegiatan persiapan pendampingan MR | |
| | | | | B06: Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di lingkungan Kantor | B06: Laporan pendampingan penerapan MR | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|--|---|--|---|---|-----------------------|
| | | | | Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | |
| | | | | B09: Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | B09: Laporan pendampingan penerapan MR | |
| | | | | B12: Evaluasi pelaksanaan MR | B12: Laporan kompilasi evaluasi pelaksanaan MR | |
| 3. | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen dan BPK | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen dan BPK | B03: 1. Inventarisasi data temuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Itjen 2. Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen | B03: 1. Laporan TLHP 2. Bukti Penyetoran | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|---|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | | B06: Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen | B06: 1. Laporan TLHP 2. Bukti penyetoran | |
| | | | | B09: Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen | B09: 1. Laporan TLHP 2. Bukti penyetoran | |
| | | | | B12: 1. Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen 2. Laporan evaluasi | B12: 1. Laporan TLHP 2. Bukti penyetoran 3. Laporan evaluasi | |
| 4. | Optimalisasi Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis | Terlaksananya Pelaporan LHKASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis teknologi informasi | Tercapainya pelaporan LHKASN 100% | B03: 1. Persiapan evaluasi pelaporan LHKASN 2. Evaluasi laporan LHKASN triwulan I | B03: Laporan evaluasi LHKASN Triwulan I | |
| | | | | B06: Evaluasi laporan LHKASN triwulan II | B06: Laporan evaluasi LHKASN Triwulan II | |
| | | | | B09: Evaluasi laporan LHKASN triwulan III | B09: Laporan evaluasi LHKASN Triwulan III | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----------------------------------|---|--|--|---|---|-----------------------|
| | teknologi informasi | | | B12: Evaluasi laporan LHKASN triwulan IV dan Kompilasi | B12: Laporan evaluasi LHKASN Triwulan I dan Kompilasi | |
| KEPALA DIVISI ADMINISTRASI | | | | | | |
| 5. | Peningkatan citra positif Kementerian Hukum dan HAM | Tersebar nya informasi kementerian Hukum dan HAM secara terstruktur, masif, dan sistematis | Informasi Kementerian Hukum dan HAM disebar kan di seluruh media sosial (FB, Instagram,dan Twitter) seluruh Satuan Kerja | B03: Penyampaian data akun media sosial (FB, Instagram, dan Twitter) seluruh satuan kerja di wilayah yang sudah terkoneksi dengan media sosial Kementerian Hukum dan HAM ke Sekretariat Jenderal | B03: Surat penyampaian akun media sosial (FB, Instagram,dan twitter) dan SK admin pengelola Satuan Kerja ke Sekretariat Jenderal cq Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama | |
| | | | | B06: Menyebarkan 10 (sepuluh) narasi tunggal dari Biro Humas Hukum dan Kerja sama di seluruh media sosial (FB, Instagram,dan twitter) kantor wilayah dan UPT | B06: Laporan penyebaran narasi tunggal di media sosial (FB, Instagram, dan twitter) seluruh Satuan Kerja | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|---|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------|
| | | | | <p>B09: Menyebarkan 10 (sepuluh) narasi tunggal dari Biro Humas Hukum dan Kerja sama di seluruh media sosial (FB, Instagram, dan twitter) kantor wilayah dan UPT</p> | <p>B09: Laporan penyebaran narasi tunggal di media sosial (FB, Instagram, dan twitter) seluruh Satuan Kerja</p> | |
| | | | | <p>B12: Menyebarkan 5 (lima) narasi tunggal dari Biro Humas Hukum dan Kerja sama di seluruh media sosial (FB, Instagram, dan twitter) kantor wilayah dan UPT</p> | <p>B12: Laporan penyebaran narasi tunggal di media sosial (FB, Instagram, dan twitter) seluruh Satuan Kerja</p> | |
| 6. | Peningkatan Disiplin pegawai terhadap kehadiran | Pegawai mematuhi aturan jam kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Disiplin sudah sesuai Peraturan yang berlaku 2. Presentasi pegawai yang Tidak Masuk Kerja atau Terlambat tanpa keterangan | <p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Supervisi penegakan disiplin kehadiran pegawai 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hukuman disiplin (hukdis) dengan Itjen | <p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil rekon 2. Laporan hasil supervisi Unit Pusat 3. Laporan evaluasi kehadiran pegawai | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|
| | | | dibawah 15% untuk masing-masing unit | <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Supervisi penegakan disiplin kehadiran pegawai Kanwil Kemenkumham 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hukdis dengan Itjen | <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil rekon 2. Laporan hasil supervisi Unit Pusat 3. Laporan evaluasi kehadiran pegawai | |
| | | | | <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Supervisi penegakan disiplin kehadiran pegawai Kanwil Kemenkumham 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hukdis dengan Itjen | <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil rekon 2. Laporan hasil supervisi Unit Pusat 3. Laporan evaluasi kehadiran pegawai | |
| | | | | <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Supervisi penegakan disiplin kehadiran pegawai Kanwil Kemenkumham | <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil rekon 2. Laporan hasil supervisi Unit Pusat | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|---|---|---|--|--|-----------------------|
| | | | | 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hukdis dengan Itjen | 3. Laporan evaluasi kehadiran pegawai | |
| 7. | Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | <p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA. 2019 Tersusunnya Laporan Keuangan Semester II T.A. 2019 sesuai dengan SAP | <p>B03:</p> <p>Laporan Keuangan Semester II T.A. 2019</p> | |
| | | | | <p>B06:</p> <p>Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I T.A. 2020</p> | <p>B06:</p> <p>Notula Rapat Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I T.A. 2020</p> | |
| | | | | <p>B09:</p> <p>Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I T.A. 2020 sesuai dengan SAP</p> | <p>B09:</p> <p>Laporan Keuangan Semester I T.A. 2020</p> | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|------------------------|--|--|--|---|-----------------------|
| | | | | B12: Tersusunnya Laporan Keuangan Triwulan III T.A. 2020 sesuai dengan SAP | B12: Laporan Keuangan Triwulan III T.A. 2020 | |
| 8. | Implementasi SIPaSTIKU | Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) berdasarkan Dirsbursement Plan melalui SIPaSTIKU di Kantor Wilayah | Seluruh Kantor Wilayah menggunakan SIPaSTIKU | B03: Laporan Pelaksanaan PBJ per bulan (Januari-Maret) pada seluruh satker di Kantor Wilayah | B03: <i>Screenshot</i> fitur laporan pada SI PaSTIKU | |
| | | | | B06: Laporan Pelaksanaan PBJ per bulan (April-Juni) pada seluruh satker di Kantor Wilayah | B06: <i>Screenshot</i> fitur laporan pada SI PaSTIKU | |
| | | | | B09: Laporan Pelaksanaan PBJ per bulan (Juli-September) pada seluruh satker di Kantor Wilayah | B09: <i>Screenshot</i> fitur laporan pada SI PaSTIKU | |
| | | | | B12: Laporan pelaksanaan PBJ per bulan (Oktober- | B12: <i>Screenshot</i> fitur laporan pada SI PaSTIKU | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|--|--|---|---|--|-----------------------|
| | | | | Desember) pada seluruh satker di Kantor Wilayah | | |
| 9. | Mewujudkan Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi (TI) | Terkoordinasinya pengembangan TI Kemenkumham baik dalam bidang Infrastruktur maupun aplikasi dalam sebuah <i>grand design</i> TI Kementerian | Pengembangan infrastruktur dan aplikasi di unit utama dan Kanwil tidak tumpang tindih atau duplikasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran TI Kemenkumham | B06: Evaluasi TI di Kantor Wilayah B09: Postur Anggaran TI tahun 2021 di Kantor Wilayah | Laporan evaluasi RKA-KL Teknologi Informasi Kantor Wilayah | |
| 10. | Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> pada Kantor Wilayah dan UPT | 1. Terlaksananya Internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> pada Kantor Wilayah dan UPT Kemenkumham | 90% pegawai Kantor Wilayah dan UPT telah mendapatkan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> | B03: Tahap persiapan : 1. Pedoman pelaksanaan Kemenkumham <i>Corporate University</i> 2. Penetapan peserta Internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> 3. Penjadwalan pelaksanaan | B03: 1. Pedoman 2. SK Peserta Internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> 3. Jadwal pelaksanaan Internalisasi Kemenkumham | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | | internalisasi <i>Corporate University</i> | <i>Corporate University</i> | |
| | | | | B06: Pelaksanaan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> bagi pegawai Kantor Wilayah | B06: Daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> bagi pegawai Kantor Wilayah | |
| | | | | B09: Pelaksanaan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> pada Kepala dan pegawai UPT | B09: Daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> bagi Kepala dan pegawai UPT | |
| | | | | B12: Evaluasi internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> | B12: Hasil evaluasi yang diinput ke CBHRIS | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--|--|---|--|-----------------------|
| | | 2. Pelaksanaan kegiatan <i>Coaching</i> dan Mentoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bagi pejabat administrator dan Ka. UPT di Kanwil | 90% pejabat administrator dan Ka. UPT di Kanwil memahami Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | <p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan <i>Coaching, coachee</i> dan Mentoring Penetapan <i>Coaching, coachee</i> dan Mentoring | <p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar hadir, dokumentasi dan notulensi SK Penetapan <i>Coach, Coachee</i> dan Mentor | |
| | | | | <p>B06:</p> Pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring bagi pegawai pejabat administrator di Kanwil | <p>B06:</p> Daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring | |
| | | | | <p>B09:</p> Pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring bagi pegawai Ka. UPT | <p>B09:</p> Daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring | |
| | | | | <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Capture</i> nilai Indikator Kinerja | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|--|--|---|---|---|-----------------------|
| | | | | 2. Evaluasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i> di Kanwil | Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Hasil evaluasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i> di Kanwil yang di input ke dalam CBHRIS | |
| 11. | Monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019 | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019 | 90% proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019 yang ditindaklanjuti di Kanwil | B03: Inventaris data proyek perubahan alumni diklat PIM III dan IV tahun 2019 di Kanwil B06: Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni diklat PIM III dan IV di Kanwil | B03: Daftar proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019 di Kanwil 1. Hasil kegiatan diinput ke CBHRIS 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni diklat PIM III dan IV tahun 2019 di Kanwil | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|--|---|---|---|---|--|-----------------------|
| | | | | B09: Memberikan rekomendasi proyek perubahan yang dapat diimplementasikan | B09: Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala BPSDM | |
| KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM | | | | | | |
| 12. | Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang- undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasi an, pemantapan, dan pembulatan konsep produk hukum daerah | Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi produk hukum daerah | Terlaksananya pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi pada produk hukum daerah oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan pada masing- masing Kanwil Kemenkumham | B03: Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota | B03: Laporan Koordinasi dengan melampirkan: 1. SK Zonasi Perancang Peraturan Perundang- Undangan 2. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prov/Kab/Kota) 3. Daftar Hadir, Notula, dan Dokumentasi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | B06: Terharmonisasinya Produk hukum daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan Kantor Wilayah berdasarkan surat selesai pengharmonisasian dari Kepala Kantor Wilayah ke Pemerintah Daerah | B06: Laporan yang melampirkan surat permohonan pengharmonisasian, surat selesai harmonisasi, rancangan peraturan daerah, notula rapat, daftar hadir, dokumentasi | |
| | | | | B09: Terharmonisasinya Produk hukum daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan Kantor Wilayah berdasarkan surat selesai pengharmonisasian dari Kepala Kantor Wilayah ke Pemerintah Daerah | B09: Laporan yang melampirkan surat permohonan pengharmonisasian, surat selesai harmonisasi, rancangan peraturan daerah, notula rapat, daftar hadir, dokumentasi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|---|---|---|--|---|--------------------|
| | | | | B12: Menyusun laporan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi pada produk hukum daerah dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan | B12: Laporan pengharmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi produk hukum daerah | |
| 13. | Menciptakan kondisi/iklim ramah investasi yang responsif terhadap adanya tindak pidana pencucian uang | Implementasi kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) di Wilayah | Meningkatnya jumlah pelapor Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) di Wilayah. | B03: 1. Pembentukan Tim 2. Rapat persiapan awal 3. Pemetaan data Pemilik Manfaat di wilayah | B03: 1. SK Tim 2. Laporan Persiapan awal (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi) 3. Matriks data pelaporan Pemilik Manfaat di wilayah | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | B06: Diseminasi kebijakan pelaporan Pemilik Manfaat di Wilayah Periode I | B06: 1. Laporan Tim 2. Laporan Diseminasi (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi) | |
| | | | | B09: Diseminasi kebijakan pelaporan Pemilik Manfaat di Wilayah Periode II | B09: 1. Laporan Tim 2. Laporan Diseminasi (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi) | |
| | | | | B12: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Diseminasi | B12: 1. Laporan Evaluasi 2. Matriks Data pelaporan Pemilik Manfaat di | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|--|---|--|---|--|-----------------------|
| | | | | | wilayah (setelah diseminasi) | |
| 14. | Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten | Tercapainya pemahaman masyarakat tentang pendaftaran/pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di Wilayah | Meningkatnya pendaftaran/pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum yang dapat mendukung peningkatan investasi di Wilayah | <p>B03: 1. Rapat Persiapan Awal 2. Pendataan jumlah badan hukum di Wilayah</p> <p>B06: <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) tentang Pedoman pendaftaran/ pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum Periode I</p> <p>B09: <i>Focus Group Discussion</i> tentang Pedoman pendaftaran/ pengesahan Badan</p> | <p>B03: 1. Laporan Persiapan awal (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi) 2. Matriks Data Jumlah Badan Hukum di Wilayah</p> <p>B06: Laporan FGD (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi)</p> <p>B09: Laporan FGD (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi)</p> | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|---|---|---|--|--|-----------------------|
| | | | | Usaha Berbadan Hukum Periode II | | |
| | | | | B12: Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> | B12: Laporan Evaluasi | |
| 15. | Meningkatkan pengawasan notaris melalui pengenalan pengguna jasa notaris untuk menghindari praktik pencucian uang | Tercapainya pemahaman Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah | Meningkatnya pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah terkait penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah | B03: Rapat Persiapan Awal | B03: Laporan Persiapan awal (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi) | |
| | | | | B06: Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah Periode I | B06: Laporan Rapat Koordinasi (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi) | |
| | | | | B09: Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan | B09: Laporan Rapat Koordinasi (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|---|---|---|---|---|--------------------|
| | | | | PMPJ oleh Notaris di Wilayah Periode II | Surat Undangan, Bahan Materi) | |
| | | | | B12: Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD | B12: Laporan Evaluasi | |
| 16. | Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual (KI) | Kantor Wilayah mampu memetakan potensi KI di wilayahnya masing-masing | Terbentuknya Peta Potensi Kekayaan Intelektual sebagai dasar diseminasi | B03: Koordinasi dengan DJKI mengenai rezim KI yang akan diinventarisasi | B03: 1. Surat Penugasan 2. Laporan koordinasi dengan DJKI untuk menentukan penyusunan inventarisasi potensi KI yang ada di Kabupaten/Kota | |
| | | | | B06: 1. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi | B06: 1. Surat Penugasan 2. Laporan Koordinasi dengan | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | <p>Kekayaan Intelektual di wilayah</p> <p>2. Melakukan diseminasi sesuai dengan potensi KI di wilayah</p> | <p><i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di kabupaten/kota</p> <p>3. Laporan kegiatan diseminasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota sesuai dengan peta potensi</p> | |
| | | | | <p>B09:</p> <p>1. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di wilayah</p> <p>2. Melakukan diseminasi sesuai dengan potensi KI di wilayah</p> | <p>B09:</p> <p>1. Surat Penugasan</p> <p>2. Laporan Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota</p> | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | | | 3. Laporan kegiatan diseminasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota sesuai dengan peta potensi | |
| | | | | B12: 1. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di wilayah 2. Melakukan diseminasi sesuai dengan potensi KI di wilayah 3. Tersedianya Peta Potensi KI di wilayah | B12: 1. Surat Penugasan 2. Laporan Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota 3. Laporan kegiatan diseminasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|---|--|---|--|---|-----------------------|
| | | | | | sesuai dengan peta potensi 4. Dokumen Peta Potensi KI di wilayah | |
| 17. | Meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui peningkatan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Sentra KI dan komunitas-komunitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Permohonan KI yang diajukan dari Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Peningkatan jumlah data di Kekayaan Intelektual Komunal pada pusat data nasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Jumlah Permohonan KI di Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Meningkatnya Jumlah inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten/Kota/Provinsi | <p>B03: Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Sentra KI dan komunitas-komunitas dalam mempersiapkan <i>draft</i> Perjanjian Kerjasama (PKS) meningkatkan permohonan pendaftaran KI dan inventarisasi KIK</p> <p>B06: 1. Penandatanganan PKS 2. Pelaksanaan PKS/pendampingan</p> | <p>B03: <i>Draft</i> PKS Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah, Sentra KI dan komunitas-komunitas</p> <p>B06: 1. PKS yang sudah ditandatangani 2. Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama</p> | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|--|---|---|---|---|-----------------------|
| | | | | B09: Pelaksanaan PKS/pendampingan | B09: Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama | |
| | | | | B12: 1. Pelaksanaan PKS/pendampingan 2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PKS | B12: 1. Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama 2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi | |
| 18. | Optimalisasi pemetaan potensi Pelanggaran kekayaan Intelektual dan Pengawasan Indikasi Geografis (IG) di Wilayah | 1. Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi daerah berpotensi terdapat pelanggaran kekayaan intelektual 2. Menjamin konsistensi mutu produk IG | 1. Tersedianya peta Potensi pelanggaran KI 2. Terjaminnya konsistensi mutu produk IG sesuai dengan buku deskripsi IG | B03: Koordinasi Kantor Wilayah dengan aparaturnya penegak hukum untuk menentukan indikator wilayah yang berpotensi terdapat pelanggaran KI B06: 1. Pelaksanaan kegiatan terkait Penyusunan <i>Draft Database</i> | B03: Laporan hasil Koordinasi B06: 1. Laporan Pelaksanaan kegiatan terkait | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | <p>Inventarisasi wilayah berpotensi pelanggaran KI</p> <p>2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah / Masyarakat Pengguna Indikasi Geografis (MPIG)</p> | <p>Penyusunan <i>Draft Database</i></p> <p>Inventarisasi wilayah berpotensi terdapat pelanggaran KI</p> <p>2. Laporan koordinasi</p> | |
| | | | | B09: Inventarisasi wilayah berpotensi terjadinya pelanggaran KI | B09: Laporan koordinasi dengan aparaturnegak hukum di wilayah | |
| | | | | B12: Peta wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran KI | B12: Laporan ke DJKI terkait <i>Database</i> wilayah yang berpotensi terdapat pelanggaran KI | |
| 19. | Meningkatkan Koordinasi dengan <i>Stakeholders</i> | Terlaksananya penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM | Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh instansi | B03: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang | B03: 1. Surat tanggapan/hasil rapat koordinasi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|--|--|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| | Dalam Rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM | oleh instansi terkait/pemangku kepentingan | terkait/pemangku kepentingan | belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya | dengan instansi terkait/ pemangku kepentingan; 2. Laporan penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM | |
| | | | | B06: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan I | B06: 1. Surat tanggapan/hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait/ pemangku kepentingan; 2. Laporan penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|
| | | | | <p>B09: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan II</p> | <p>B09: 1. Surat tanggapan/hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait/ pemangku kepentingan; 2. Laporan penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM</p> | |
| | | | | <p>B12: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan III</p> | <p>B12: 1. Surat tanggapan/hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait/ pemangku kepentingan 2. Laporan penanganan</p> | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|---|---|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM | |
| 20. | Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah presiden | Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah presiden | Pemerintah Daerah telah melaporkan Aksi Hak Asasi Manusia | B03: 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM 2019 Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Bimtek bagi pemerintah daerah (provinsi, kab/kota) tentang Aksi HAM Daerah 3. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota | B03: 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM 2019 2. Laporan Bimtek 3. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | B06: 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota | B06: 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B04 2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota | |
| | | | | B09: 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota | B09: 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B08 2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|---|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | B12: 1. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B12 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota | B12: 1. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B12 | |
| 21. | Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM | Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat kriteria Peduli HAM | B03: 1. Pemetaan Kabupaten Kota Peduli HAM (Yang Telah Melaksanakan, Yang Belum Pernah Mendapatkan Predikat dan Yang Belum Pernah Mengusulkan) 2. Bimtek Permenkumham | B03: 1. Laporan hasil pemetaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (Yang Telah Melaksanakan, Yang Belum Pernah Mendapatkan Predikat dan Yang Belum Pernah Mengusulkan) | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | tentang Kabupaten/Kota Peduli HAM | 2. Laporan Bimtek | |
| | | | | B06: 1. Notifikasi bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota tentang pelaporan indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Pemeriksaan data indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 3. Menginput data yang sudah diperiksa kanwil ke aplikasi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM | B06: 1. Surat notifikasi 2. Berita acara pemeriksaan | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | B09: 1. Pemeriksaan data indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Menginput data yang sudah diperiksa kanwil ke aplikasi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM | B09: 1. Berita acara pemeriksaan | |
| | | | | B12: 1. Notifikasi hasil penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Evaluasi pelaksanaan pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM | B12: 1. Surat notifikasi 2. Laporan Evaluasi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|--|---|--|---|---|-----------------------|
| 22. | Mendorong terwujudnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM | Terintegrasinya materi muatan HAM dalam Rancangan Produk Hukum Daerah | Dokumen analisis dan rekomendasi materi muatan HAM dalam Rancangan Produk Hukum Daerah | B03: Pemetaan Rancangan Produk Hukum Daerah dalam Program Legislasi Daerah yang terkait dengan substansi HAM | B03: Dokumen Pemetaan Rancangan Produk Hukum Daerah dalam Program Legislasi Daerah yang terkait dengan substansi HAM | |
| | | | | B06: Analisis Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM | B06: Dokumen Analisa Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM | |
| | | | | B09: <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM | B09: Laporan hasil FGD Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM | |
| | | | | B12: Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM | B12: Dokumen Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|---|---|--|---|--|-----------------------|
| 23. | Pembentukan Pos Yankomas di UPT | Terbentuknya Pos dan Petugas Pos Yankomas di seluruh UPT | SK Pembentukan dan Pelaksana Pos Yankomas di seluruh UPT | B03 : Pemetaan Pos Yankomas di Provinsi/Kabupaten/ Kota | B03: Laporan Peta Pos Yankomas | |
| | | | | B06: Sosialisasi kepada UPT yang belum membentuk Pos Yankomas | B06: Dokumentasi kegiatan Sosialisasi | |
| | | | | B09: Pembentukan dan Pengukuhan Pos Yankomas di UPT | B09: Kompilasi Surat Keputusan Pembentukan Pos Yankomas | |
| | | | | B12: Bimtek bagi Pelaksana Pos Yankomas | B12: Dokumentasi Pelaksanaan Bimtek | |
| 24. | Terintegrasinya Dokumen Hukum Daerah dalam <i>Database</i> Dokumen Hukum Nasional | Terintegrasinya <i>website</i> Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Tingkat Daerah (Provinsi, | Bertambahnya jumlah Anggota JDIHN di tingkat daerah yang terintegrasi dengan portal jdihn.go.id | B03: Pemetaan Anggota JDIHN di Tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan, dan Perguruan Tinggi | B03: Laporan pemetaan Anggota JDIHN | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|--|---|--|--|---|-----------------------|
| | | Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan, dan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta) dengan portal jdihn.go.id | | Negeri/Perguruan Tinggi Swasta) | | |
| | | | | B06: Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Anggota JDIHN di tingkat daerah | B06: Laporan Pelaksanaan Kegiatan | |
| | | | | B09: Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Anggota JDIHN di tingkat daerah | B09: Laporan Hasil Evaluasi | |
| | | | | B12 : Penyampaian Laporan Pengelolaan JDIH Kantor Wilayah sesuai dengan Permenkumham No. 8 Tahun 2019 melalui aplikasi <i>e-reporting</i> JDIHN | B12: Laporan Pengelolaan JDIH Kantor Wilayah | |
| 25. | Tersedia Perpustakaan Hukum <i>online</i> di setiap kantor wilayah | Terselenggaranya pelayanan perpustakaan hukum secara <i>online</i> di lingkungan Kantor | Pemanfaatan Aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil untuk Layanan Perpustakaan Hukum <i>Online</i> di | B03: Pengolahan Koleksi Perpustakaan (Input Data Koleksi Perpustakaan) dalam | B03: Laporan Hasil Pengolahan Koleksi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--|------------------------------|--|---|-----------------------|
| | | Wilayah melalui Aplikasi ILDIS / JDIH Kanwil | lingkungan Kantor Wilayah | aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil | | |
| | | | | B06: 1. Pengolahan Koleksi Perpustakaan (Input Data Koleksi Perpustakaan) dalam Aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil 2. Promosi Layanan Perpustakaan <i>Online</i> pada JDIH Kanwil melalui Akun Media Sosial | B06: Laporan Pengolahan dan Promosi Layanan Perpustakaan Hukum <i>Online</i> | |
| | | | | B09: Statistik Jumlah Pemustaka <i>Online</i> yang memanfaatkan Layanan Informasi Perpustakaan pada Aplikasi ILDIS / JDIH Kanwil | B09: Laporan Pemanfaatan JDIH Kanwil untuk Layanan Perpustakaan Hukum <i>Online</i> | |
| | | | | B12: Melakukan evaluasi Pemanfaatan Aplikasi | B12: Laporan Hasil Evaluasi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|---|--|---|--|---|-----------------------|
| | | | | ILDIS / JDIIH Kanwil untuk Layanan Perpustakaan <i>Online</i> di lingkungan Kantor Wilayah | | |
| 26. | Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah terkait Pemberdayaan UMKM dan/atau Cipta Lapangan Kerja | Termanfaatkannya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah oleh pemangku kepentingan | Tersusunnya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah | B03: Terinventarisirnya semua produk hukum daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi | B03: Daftar produk hukum daerah objek analisis dan evaluasi | |
| | | | | B06: Penggunaan Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum (BPHN) terhadap produk hukum daerah dalam rangka pelaksanaan analisis dan evaluasi | B06: Pengisian dokumen (matriks) sesuai dengan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum | |
| | | | | B09: Penyusunan rekomendasi dan penyampaian laporan kepada BPHN | B09: Laporan akhir berisi dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|--|---|---|--|--|-----------------------|
| | | | | dan kepada Biro/Bagian Hukum di Sekretariat Daerah | | |
| 27. | Pengawasan dan Perluasan Pelaksanaan Bantuan Hukum | Meningkatnya Kualitas Layanan Bantuan Hukum | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum | <p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditandatanganinya Kontrak Bantuan Hukum 2. Tersusunnya SK Panitia Pengawas Daerah | <p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani pada bulan Januari 2. SK Panitia Pengawas Daerah | |
| | | | | <p>B06:</p> <p>Sosialisasi/Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk perluasan pemberian bantuan hukum melalui pembentukan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah</p> | <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rapat sosialisasi/koordinasi (undangan, notula, daftar hadir, dokumentasi) 2. Laporan Kegiatan Sosialisasi/koordinasi dengan pemerintah daerah untuk | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|--|--|--|---|---|-----------------------|
| | | | | | <p>perluasan pemberian bantuan hukum melalui pembentukan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah</p> | |
| | | | | B09: Pemantauan dan Evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah | B09: 1. Laporan Pemantauan dan Evaluasi 2. Isian kuesioner Pemantauan dan Evaluasi yang ditandatangani Penerima Bantuan Hukum | |
| 28. | Kajian Hukum dan HAM di wilayah dengan tema: | Rekomendasi hasil kajian sebagai data awal (data sekunder) penelitian Badan Penelitian dan | Termanfaatkannya Rekomendasi hasil kajian sebagai data awal (data sekunder) penelitian | B03: 1. Tersusunnya SK Tim Kajian 2. Usulan proposal Kajian | B03: 1. SK Tim Kajian 2. Surat Usulan dan Proposal Kajian | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|---|--|---|--|---|-----------------------|
| | 1. Kesiapan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Menuju Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Corporate University</i> 2. Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat | Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia | 3. Persetujuan Proposal Kajian yang ditandatangani Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Terlaksananya presentasi proposal Kajian | 3. Bukti Persetujuan Proposal Kajian yang ditandatangani Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Bahan presentasi proposal Kajian (format power point) 5. Notula dan daftar hadir kegiatan Presentasi Proposal Kajian 6. Foto dokumentasi kegiatan | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Presentasi Proposal Kajian | |
| | | | | B06: 1. Pelaksanaan pengumpulan data lapangan Kajian 2. Pengolahan dan analisa data lapangan Kajian 3. Presentasi <i>Draft</i> Laporan Akhir Kajian dengan mengundang <i>stakeholders</i> 4. Penyampaian Laporan Akhir Kajian kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia | B06: 1. Hasil Data Lapangan Kajian 2. <i>Draft</i> Laporan Akhir Kajian 3. Bahan Presentasi <i>Draft</i> Laporan Akhir Kajian (ppt) 4. Notula dan Daftar hadir kegiatan Presentasi <i>Draft</i> Laporan Akhir Kajian yang melibatkan <i>stakeholders</i> 5. Laporan Akhir Kajian 6. <i>Capture</i> Bukti Penyampaian Laporan Akhir Kajian kepada | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|---|---|---|---|---|-----------------------|
| | | | | | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi SISUMAKER/ <i>Email</i> | |
| | | | | B09: Evaluasi hasil kajian yang dimanfaatkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia | B09: Laporan Rencana Aksi Pemanfaatan Hasil Kajian | |
| 29. | Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah | Analisis kebijakan dan reporting berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah | Laporan Analisis kebijakan dan reporting berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM | B03: Terbitnya SK TIM Analisis kebijakan dan <i>reporting</i> berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM | B03: SK Tim Analisis kebijakan dan <i>reporting</i> berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | | B06: Tersusunnya analisis kebijakan dan <i>reporting</i> dengan pemanfaatan SIPKUMHAM | B06: Laporan analisis kebijakan dan <i>reporting</i> dengan pemanfaatan SIPKUMHAM | |
| | | | | B09: Tersusunnya analisis kebijakan dan pelaporan SIPKUMHAM | B09: Laporan analisis kebijakan dan pelaporan SIPKUMHAM | |
| | | | | B12: 1. Tersusunnya analisis kebijakan dan <i>reporting</i> SIPKUMHAM 2. Evaluasi pelaksanaan analisis kebijakan dan <i>reporting</i> SIPKUMHAM | B12: 1. Laporan analisis kebijakan dan <i>reporting</i> SIPKUMHAM 2. Laporan evaluasi analisis kebijakan dan <i>reporting</i> SIPKUMHAM | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|------------------------------|---|--|--|--|--|-----------------------|
| DIVISI PEMASYARAKATAN | | | | | | |
| 30. | Percepatan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan guna penanganan over kapasitas <i>overstaying</i> dan peningkatan keterampilan narapidana melalui kerjasama | 1. Menurunnya jumlah <i>overstaying</i> melalui penguatan data dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> | Penanganan <i>overstaying</i> melalui penguatan data dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> | B03: 1. SK penunjukan operator 2. Penyampaian keputusan bersama terkait pengembalian tahanan yang habis masa penahanan kepada para <i>stakeholder</i> 3. Melakukan supervisi dan verifikasi data tahanan dalam SDP 4. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> terkait tahanan yang <i>overstaying</i> 5. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> yang akan habis masa | B03: 1. SK Operator 2. Surat penyampaian Keputusan bersama 3. Laporan supervisi dan verifikasi data tahanan 4. Surat Pemberitahuan tahanan yang <i>overstaying</i> 5. Laporan rekapitulasi pemberitahuan kepada instansi penahan H-10, H-3, H-1 6. Laporan rekapitulasi Berita acara | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|
| | | | | penahanan H-10, H-3, H-1 6. Pengembalian tahanan kepada instansi yang melakukan penahanan | pengembalian tahanan | |
| | | | | B06: 1. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> yang akan habis masa penahanan H-10, H-3, H-1 2. Pengembalian tahanan kepada instansi yang melakukan penahanan | B06: 1. Laporan rekapitulasi pemberitahuan kepada instansi penahan H-10, H-3, H-1 2. Laporan rekapitulasi Berita acara pengembalian tahanan | |
| | | | | B09: 1. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> yang akan habis masa | B09: 1. Laporan rekapitulasi pemberitahuan kepada instansi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|
| | | | | penahanan H-10, H-3, H-1 2. Pengembalian tahanan kepada instansi yang melakukan penahanan | penahan H-10, H-3, H-1 2. Laporan rekapitulasi Berita acara pengembalian tahanan | |
| | | | | B12: 1. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> yang akan habis masa penahanan H-10, H-3, H-1 2. Pengembalian tahanan kepada instansi yang melakukan penahanan 3. Monitoring dan evaluasi | B12: 1. Laporan rekapitulasi pemberitahuan kepada instansi penahan H-10, H-3, H-1 2. Laporan rekapitulasi Berita acara pengembalian tahanan 3. Laporan monitoring dan evaluasi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--|---|---|--|-----------------------|
| | | 2. Penanganan overkapasitas melalui pemberian hak kepada Narapidana secara <i>online</i> | Penanganan overkapasitas melalui pemberian hak kepada Narapidana secara <i>online</i> | B03: 1. Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat 2. Inventarisasi data narapidana yang akan mendapatkan remisi dan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan | B03: 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi 2. Data Inventarisasi 3. Laporan pelaksanaan pemberian Remisi secara <i>online</i> 4. Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 5. Laporan pelaksanaan penggunaan sidik jari narapidana | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | Cuti Bersyarat tahun 2020 3. Terlaksananya pemberian Remisi secara <i>online</i> 4. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> tepat waktu. 5. Terlaksananya layanan <i>self service</i> Remisi, PB, CB dan CMB secara <i>online</i> | | |
| | | | | B06: 1. Terlaksananya pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 100% tepat waktu. 3. Terlaksananya layanan <i>self service</i> | B06: 1. Laporan pelaksanaan pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|
| | | | | Remisi, PB, CB dan CMB secara <i>online</i> | 3. Laporan pelaksanaan penggunaan sidik jari narapidana | |
| | | | | B09: 1. Terlaksananya pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 3. Terlaksananya layanan <i>self service</i> Remisi, PB, CB dan CMB secara <i>online</i> | B09: 1. Laporan pelaksanaan pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 3. Laporan pelaksanaan penggunaan sidik jari narapidana | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|---|--|---|---|-----------------------|
| | | | | B12: 1. Terlaksananya pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 3. Terlaksananya layanan <i>self service</i> Remisi, PB, CB dan CMB secara Online | B12: 1. Laporan pelaksanaan pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 3. Laporan pelaksanaan penggunaan sidik jari narapidana | |
| | | 3. Meningkatnya kerjasama dengan para <i>stakeholder</i> dalam meningkatkan keterampilan narapidana | Narapidana yang terlatih, terampil dan bersertifikat | B03: 1. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan di Lapas Medium (kerjasama dengan | B03: 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan (Form 28 A) | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|
| | | | | Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI) 2. Terlaksananya pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas Medium | | |
| | | | | B06: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas Medium | B06: 1. Standar Pendidikan Vokasi Bagi Narapidana di Lapas (Agribisnis, Manufaktur dan Jasa) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan (Form 28 A) | |
| | | | | B09: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan | B09: 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|--|---|--|---|---|-----------------------|
| | | | | (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas Medium | 2. Laporan bulanan latihan keterampilan (Form 28 A) | |
| | | | | B12: 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Terlaksananya pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas Medium | B12: 1. Laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan (Form 28 A) | |
| 31. | Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap | 1. Meningkatnya koordinasi pengamanan dengan instansi terkait | Seluruh Lapas/Rutan melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait | B03: Seluruh Lapas/Rutan melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait | B03: Laporan Pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait | |
| | | | | B06: Seluruh Lapas/Rutan melaksanakan koordinasi | B06: Laporan Pelaksanaan koordinasi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|---------------------------|---|--|---|--|-----------------------|
| | narkoba di Lapas/Rutan | | | pengamanan dengan instansi terkait | pengamanan dengan instansi terkait | |
| | | | | B09: Seluruh Lapas/Rutan melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait | B09: Laporan Pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait | |
| | | | | B12: Monitoring dan Evaluasi | B12: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi | |
| | | 2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kamtib yang bersumber dari dalam maupun dari luar | 1. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib | B03: Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib | B03: Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib | |
| | | | | B06: Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib | B06: Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------|
| | | | | B09: Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib | B09: Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib | |
| | | | | B12: Monitoring dan Evaluasi terkait dengan tindak lanjut hasil deteksi dini kerawanan gangguan kamtib | B09: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi | |
| | | | 2. Terlaksananya Sidak dan Tes Urin Bagi Petugas dan Narapidana | B03: 1. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Sidak 2. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Tes Urin | B03: 1. Laporan Pelaksanaan Sidak di seluruh Lapas dan Rutan 2. Laporan Pelaksanaan Tes Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | B06: 1. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Sidak 2. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Tes Urin | B06: 1. Laporan Pelaksanaan Sidak di seluruh Lapas dan Rutan 2. Laporan Pelaksanaan Tes Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba | |
| | | | | B09: 1. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Sidak 2. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Tes Urin | B09: 1. Laporan Pelaksanaan Sidak di seluruh Lapas dan Rutan 2. Laporan Pelaksanaan Tes Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--|---|--|---|-----------------------|
| | | | | B12: Monitoring dan Evaluasi terkait dengan tindak lanjut hasil deteksi dini kerawanan gangguan kamtib | B12: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi | |
| | | 3. Lapas/Rutan bebas dari peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi pelaksanaan Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal | 1. Kedisiplinan Petugas | B03: Seluruh Lapas dan Rutan telah membentuk Tim Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) | B03: Surat Keputusan Tim Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) | |
| | | | 2. Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dan Pengaman Pintu Utama (P2U) | B06: Seluruh Lapas dan Rutan telah melaksanakan tugas dan fungsi satuan operasional kepatuhan internal (Satopspatnal) | B06: Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan fungsi satuan operasional kepatuhan internal (Satopspatnal) | |
| | | | 3. Pelaksanaan Layanan Kunjungan | B09: Seluruh Lapas dan Rutan telah melaksanakan tugas dan fungsi satuan | B09: Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan fungsi satuan | |
| | | | 4. Pelaksanaan Penjagaan | | | |
| | | | 5. Pengamanan Pelaksanaan Mapenaling | | | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|---|--|--|---|---|-----------------------|
| | | | 6. Pelaksanaan Pengawasan 7. Pelaksanaan Penempatan Narapidana/Tahanan Dalam Kamar Hunian 8. Layanan Penyediaan Makanan dan Kebutuhan Dasar Lainnya 9. Layanan Registrasi dan Integrasi | operasional kepatuhan internal (Satopspatnal) B12: Monitoring dan Evaluasi | operasional kepatuhan internal (Satopspatnal) B12: Laporan Pelaksanaan dan evaluasi | |
| 32. | Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP dan Anak | Tahanan/Narapidana/ Anak pecandu narkotika memperoleh Layanan Rehabilitasi Narkotika | Terselenggaranya layanan rehabilitasi narkotika bagi Tahanan, Narapidana dan Anak | B03: Pembentukan mentor rehabilitasi narkotika di tingkat wilayah B06: Supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di UPT Pemasarakatan | B03: Daftar mentor Rehabilitasi Narkotika B06: Laporan supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di wilayah | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----------------------------|---------------------------|--|---|---|---|-----------------------|
| | | | | B09: Supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di UPT Pemasarakatan | B09: Laporan supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di wilayah | |
| | | | | B12: Evaluasi tahunan penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika | B12: Laporan evaluasi tahunan penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika | |
| DIVISI KEIMIGRASIAN | | | | | | |
| 33. | Pelayanan Paspur Simpatik | Terwujudnya pelayanan Paspur RI kepada Masyarakat di luar hari kerja | Meningkatnya jumlah permohonan paspor yang terlayani di luar hari kerja Satuan Kerja Teknis | B03: 1. Pemetaan dan Penjadwalan Hari Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik 2. Pembentukan SK Tim 3. Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik | B03: 1. Dokumen Pemetaan dan Penjadwalan 2. Dokumen SK Tim 3. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik 4. Laporan Survei Indeks Kepuasan | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|
| | | | | 4. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan | | |
| | | | | B06: 1. Pemetaan dan Penjadwalan Hari Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 2. Pembentukan SK Tim 3. Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 4. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan | B06: 1. Dokumen Pemetaan dan Penjadwalan 2. Dokumen SK Tim 3. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 4. Laporan Survei Indeks Kepuasan | |
| | | | | B09: 1. Pemetaan dan Penjadwalan Hari Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 2. Pembentukan SK Tim 3. Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik | B09: 1. Dokumen Pemetaan dan Penjadwalan 2. Dokumen SK Tim 3. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|-----|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | 4. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan | 4. Laporan Survei Indeks Kepuasan | |
| | | | | B12: 1. Pemetaan dan Penjadwalan Hari Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 2. Pembentukan SK Tim 3. Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 4. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan 5. Evaluasi dan Rekomendasi | B12: 1. Dokumen Pemetaan dan Penjadwalan 2. Dokumen SK Tim 3. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 4. Laporan Survei Indeks Kepuasan 5. Laporan Evaluasi dan Rekomendasi | |
| 34. | Penegakan Hukum (Gakkum) Keimigrasian | 1. Tersedianya Laporan Harian Intelijen (LHI) | Laporan Intelijen tepat waktu | B03: 1. Kadivim dan Ka.UPT mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tentang pembuatan LHI dan Perkiraan | B03: 1. Laporan pelaksanaan mengikuti sosialisasi LHI 2. SK Kakanwil | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | Keadaan (Kirka) Intelijen 2. Penerbitan SK Kakanwil tentang pelaksanaan pembuatan LHI dan Perkiraan Keadaan Intelijen kepada Kadivim dan KaUPT 3. Pembuatan LHI dan Kirka Intelijen oleh Ka.UPT | | |
| | | | | B06: 1. KaUPT membuat LHI dan Perkiraan Keadaan Intelijen bulanan 2. Kadivim membuat kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari KaUPT dengan menggunakan format dari Ditjen Imigrasi | B06: 1. Laporan pelaksanaan pembuatan produk LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari KaUPT 2. Laporan Kompilasi LHI dan Kirka | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | Intelijen bulanan dari Kadivim | |
| | | | | B09: 1. Ka.UPT membuat LHI dan Kirka Intelijen bulanan 2. Kadivim membuat kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Ka.UPT dengan menggunakan format dari Ditjen Imigrasi | B09: 1. Laporan pelaksanaan pembuatan produk LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Ka.UPT 2. Laporan Kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Kadivim | |
| | | | | B12: 1. Ka.UPT membuat LHI dan Kirka Intelijen bulanan 2. Kadivim membuat kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari KaUPT dengan | B12: 1. Laporan pelaksanaan pembuatan produk LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Ka.UPT | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|---|---|---|--|-----------------------|
| | | | | <p>menggunakan format dari Ditjen Imigrasi</p> <p>3. Evaluasi terkait Laporan Harian Intelijen dan Kirka Intelijen bulanan dari UPT</p> | <p>2. Laporan Kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Kadivim</p> <p>3. Laporan Evaluasi terkait Laporan Harian Intelijen dan Kirka Intelijen bulanan</p> | |
| | | 2. Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindakan Hukum | <p>1. Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Keimigrasian WNI dan WNA</p> <p>2. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum pada seluruh UPT yang dibawahahi</p> | <p>B03:</p> <p>1. Pemetaan orang asing</p> <p>2. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal</p> <p>3. Operasi Pengawasan (Prov/Kab/Kota) dalam rangka penyidikan / penegakan hukum di 25% Wilayah Kerja Kanwil</p> | <p>B03:</p> <p>1. Surat Pemberitahuan</p> <p>2. Surat Perintah Pengawasan</p> <p>3. Laporan pengawasan</p> <p>4. Laporan Sosialisasi</p> | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | | 4. Operasi pemantauan dan pendataan orang asing 25% Wilayah Kerja Kanwil 5. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum Keimigrasian di 25 % Wilayah Kerja Kanwil | | |
| | | | | B 06: 1. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal 2. Operasi Pengawasan dalam rangka penyidikan / penegakan hukum di 50% Wilayah Kerja Kanwil 3. Operasi pemantauan dan pendataan orang | B06: 1. Surat Pemberitahuan 2. Surat Perintah Pengawasan 3. Laporan pengawasan 4. Laporan Sosialisasi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | | asing di 50% Wilayah Kerja yang dibawah 4. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum Keimigrasian di 50% Wilayah Kerja Kanwil | | |
| | | | | B09: 1. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal 2. Operasi Pengawasan dalam rangka penyidikan / penegakan hukum di 75% Wilayah Kerja Kanwil 3. Operasi pemantauan dan pendataan orang asing di 75% Wilayah Kerja Kanwil | B09: 1. Surat Pemberitahuan 2. Surat Perintah Pengawasan 3. Laporan pengawasan 4. Laporan Sosialisasi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | 4. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum Keimigrasian di 75% Wilayah Kerja Kanwil | | |
| | | | | B12: 1. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal 2. Operasi Pengawasan dalam rangka penyidikan / penegakan hukum di 100% Wilayah Kerja Kanwil 3. Operasi pemantauan dan pendataan orang asing di 100% Wilayah Kerja Kanwil 4. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum Keimigrasian di | B12: 1. Surat Pemberitahuan 2. Surat Perintah Pengawasan 3. Laporan pengawasan 4. Laporan Sosialisasi 5. Laporan Evaluasi dan Rekomendasi | |

| NO | TARGET KINERJA | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | DATA DUKUNG | ACTION PLAN KANWIL |
|----|----------------|--------------------------|------------------------|--|-------------|-----------------------|
| | | | | 100% Wilayah Kerja Kanwil 5. Evaluasi dan Rekomendasi | | |